

POKOK-POKOK-PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH

2017

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 2, LD 2017/NO. 02, TLD NO. 230

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK : - Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintah. Peraturan tersebut menuntut adanya standar yang seragam dan lebih baik dalam pencatatan, pelaporan, serta pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah juga mempertimbangkan berbagai aspek dalam implementasi kebijakan keuangan sebelumnya dan menyadari perlunya penyesuaian agar aturan yang berlaku tetap relevan dengan perkembangan regulasi terbaru. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan sistem keuangan di Kabupaten Ngawi dapat berjalan lebih efisien, selaras dengan standar nasional, serta lebih akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaannya.

- Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda Kabupaten Ngawi No. 7 Tahun 2013.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi ini disusun sebagai upaya Pemda dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngawi. Regulasi ini juga menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam merancang serta mengelola anggaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebijakan nasional.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Maret 2017 dan ditetapkan tanggal 10 Maret 2017

- Penjelasan 1 Hlm.